

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu gender merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu sosial karena berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat membangun dan menata relasi sosial antara individu berdasarkan jenis kelamin, peran, serta harapan sosial yang dilekatkan pada keduanya. Dalam konteks sosiologi, gender dipahami bukan sebagai kodrat biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya berperilaku sesuai dengan kategorisasi “laki-laki” dan “perempuan”. Perbedaan gender merupakan hasil konstruksi sosial, bukan biologis, yang melibatkan sosialisasi nilai, norma, dan budaya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa gender bersifat dinamis dan dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, bergantung pada norma, nilai, dan struktur sosial yang berlaku (Maulidia, 2021). Namun, di banyak masyarakat termasuk Indonesia, sistem sosial yang masih patriarkal membuat peran dan ekspektasi gender menjadi sangat kaku dan biner, sehingga hanya mengakui dua kategori utama laki-laki dan perempuan serta menolak segala bentuk ekspresi gender yang berada di luar batas tersebut.

Penolakan terhadap ekspresi gender di luar batas biner ini kemudian melahirkan stigmatisasi yang mendalam, terutama bagi identitas transpuan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, (2025), stigma ini tidak hanya berhenti pada sentimen sosial, tetapi berujung pada kekerasan yang sistemik. Data menunjukkan bahwa identitas minoritas gender sering kali dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi berlapis.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2025), nilai Indeks Pembangunan Gender Indonesia untuk perempuan tercatat sebesar 71,97%, sedangkan laki-laki sebesar 77,13%. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, meskipun kesenjangan tersebut semakin mengecil dari tahun ke tahun karena pertumbuhan pembangunan manusia pada perempuan mengalami peningkatan yang lebih cepat.

Laporan resmi dari *Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM)* yang

dibuat oleh Rahadian, Benedicta, dan Zahro (2021) menunjukkan bahwa kelompok transpuan menghadapi stigma, kerentanan sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan 300 responden di enam provinsi. Transpuan juga tercatat sebagai kelompok yang paling banyak tinggal sendiri (40,4%) dan rentan mengalami pengusiran dari tempat tinggal, baik karena stigma identitas gender maupun kesulitan ekonomi. Selain itu, sebagian besar transpuan tidak memiliki atau tidak rutin membayar iuran BPJS Kesehatan karena kendala finansial dan pengalaman diskriminasi saat mengakses layanan publik. Laporan ini juga mencatat kasus kekerasan dan pelecehan, seperti insiden pemberian “bantuan sembako berisi sampah” kepada komunitas transpuan di Bandung, sebagai bukti nyata diskriminasi sosial yang mereka alami. Data ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi transpuan bukan hanya persoalan identitas, melainkan bentuk marginalisasi struktural yang nyata dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah.

Perbedaan antara seks biologis, identitas gender, dan ekspresi gender dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak dipahami secara tepat oleh masyarakat. Seks biologis berkaitan dengan aspek fisik seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi, sedangkan identitas gender adalah perasaan internal seseorang tentang siapa dirinya, apakah ia merasa sebagai laki-laki, perempuan, atau di antara keduanya. Sementara itu, ekspresi gender merupakan cara seseorang menampilkan identitas gendernya melalui pakaian, perilaku, gaya berbicara, atau penampilan. Ketika seseorang menampilkan identitas dan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma sosial atau kategori biner yang umum, mereka sering kali menjadi sasaran penilaian negatif, penolakan sosial, dan diskriminasi.

Fenomena keberagaman identitas gender sesungguhnya bukan hal baru. Dalam berbagai budaya lokal, ekspresi gender non-biner telah lama hadir dan bahkan memiliki peran sosial tertentu, seperti keberadaan bissu di Sulawesi Selatan, lengger lanang di Jawa, dan calalai di Bugis (Jansen, 2021). Kehadiran mereka membuktikan bahwa keragaman gender sebenarnya pernah diterima dalam sistem sosial tradisional Nusantara. Namun, perubahan sosial akibat

modernisasi, globalisasi, serta pengaruh moralitas agama yang kuat telah mengubah cara masyarakat memandang keberagaman gender. Saat ini, identitas yang tidak sesuai dengan norma heteronormatif sering kali dianggap sebagai penyimpangan, dosa, atau bahkan penyakit. Selain itu, Kesetaraan gender masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia akibat norma budaya, struktur patriarki, dan interpretasi agama, meskipun ada upaya untuk memajukan hak-hak perempuan dan memberdayakan gender yang terpinggirkan (Manalu, Simatupang, dan Silaen 2024).

Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh situasi tersebut adalah transpuan, yaitu individu yang secara biologis terlahir sebagai laki-laki namun mengidentifikasi diri dan mengekspresikan diri sebagai perempuan. Transpuan atau yang biasa kita dengar dengan sebutan waria, bencong atau banci merupakan manusia yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki namun mereka memilih jalan hidup yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya (Thahara dan Hadiwono, 2022). Transpuan sering menjadi subjek diskriminasi dan stigma karena identitasnya dianggap melanggar norma sosial dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, transpuan menghadapi berbagai bentuk perlakuan tidak adil mulai dari ejekan, pengucilan, hingga kekerasan fisik dan verbal. Mereka sering dipandang tidak layak memperoleh pekerjaan layak, sulit diterima dalam lingkungan sosial, dan bahkan kerap ditolak oleh keluarga sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa identitas gender bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berhubungan langsung dengan struktur sosial yang menentukan siapa yang diterima dan siapa yang disisihkan.

Stigma secara umum adalah penilaian negatif atau gambaran buruk yang diletakkan seseorang kepada kelompok atau individu lain (Aulia, 2025). Penilaian ini bukanlah sekadar pandangan pribadi yang terisolasi, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dilembagakan dan dipelihara melalui narasi kolektif. Ketika stigma dilekatkan pada suatu identitas, ia bertindak sebagai label sosial yang secara drastis menyederhanakan dan mendistorsi kompleksitas individu, mengubah keberadaan mereka menjadi sebuah "perbedaan" yang harus diwaspadai. Akibatnya, kelompok yang distigmatisasi sering kali menghadapi

proses isolasi, di mana mereka dikeluarkan dari kesempatan sosial, ekonomi, dan politik, yang pada akhirnya secara sistematis melahirkan dan memperparah kondisi kerentanan. Dengan demikian, stigma adalah akar dari ketidaksetaraan struktural, bukan hanya manifestasi dari prasangka individual.

Stigmatisasi terhadap transpuan dapat dijelaskan melalui konsep yang dikemukakan oleh Goffman yang mendefinisikan stigma sebagai atribut yang mendiskreditkan seseorang dan menempatkannya pada posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan orang lain. Stigma bukan hanya sekadar pandangan negatif, melainkan juga proses sosial di mana kelompok mayoritas menetapkan label tertentu kepada kelompok minoritas, lalu memperkuatnya melalui institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, media, dan hukum. Dalam konteks transpuan, stigma sering kali muncul dalam bentuk stereotip seperti “tidak bermoral”, “penyimpang”, atau “tidak layak diterima”. Label ini kemudian menjadi dasar munculnya berbagai bentuk diskriminasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan mereka.

Hubungan antara stigmatisasi yang dialami oleh transpuan dan kerentanan sosial (*social vulnerability*) bermanifestasi secara langsung melalui penolakan sistemik yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya esensial. Ketika institusi sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan hukum memperkuat stereotip negative seperti melabeli mereka sebagai kelompok yang "tidak bermoral" atau "menyimpang" transpuan secara otomatis terdorong ke pinggiran struktur sosial. Diskriminasi ini menciptakan hambatan besar dalam ranah struktural, mulai dari penolakan dalam memperoleh pekerjaan formal, kesulitan mengakses layanan kesehatan yang inklusif, hingga hilangnya hak perlindungan hukum yang setara. Akibatnya, peminggiran yang bersumber dari stigma ini merampas modal sosial dan ekonomi mereka, yang pada akhirnya menempatkan transpuan dalam kondisi rentan dan tidak memiliki jaring pengaman yang memadai untuk menghadapi krisis kehidupan.

Kerentanan sosial ini diperparah oleh akumulasi dampak psikologis dan sosial yang membatasi ruang gerak transpuan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi sosial yang lebih rendah, sebagaimana dijelaskan dalam konsep Goffman,

membuat mereka terus-menerus terpapar pada risiko kekerasan, perundungan, dan isolasi sosial tanpa adanya mekanisme perlindungan yang kuat dari komunitas sekitar. Hambatan dalam memperoleh identitas hukum formal (seperti KTP) akibat stigma birokrasi, misalnya, memutus akses mereka terhadap bantuan sosial pemerintah maupun fasilitas perbankan. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam sistem kemasyarakatan ini menegaskan bahwa stigma bukan sekadar label moral, melainkan sebuah kekuatan mekanis yang secara aktif memproduksi dan melanggengkan lingkaran setan kerentanan sosial bagi kelompok transpuan.

Akibat dari stigmatisasi tersebut, transpuan sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak. Banyak dari mereka ditolak saat melamar pekerjaan formal karena identitas gendernya tidak sesuai dengan dokumen resmi yang masih mencantumkan jenis kelamin laki-laki. Akibatnya, mereka terpaksa bekerja di sektor informal seperti salon kecantikan, dunia hiburan malam, atau bahkan pekerjaan berisiko seperti pekerja seks untuk bertahan hidup. Kondisi ini tidak hanya memperlihatkan bentuk ketidakadilan struktural, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan yang sulit mereka keluar darinya. Selain itu, stigma sosial juga berdampak pada kondisi psikologis, seperti rasa rendah diri, depresi, dan hilangnya kepercayaan diri. Transpuan kerap menutupi jati dirinya di ruang publik untuk menghindari ejekan atau kekerasan, yang pada akhirnya menghambat proses aktualisasi diri dan partisipasi sosial mereka sebagai warga negara.

Stigma yang berkelanjutan dan diskriminasi yang melekat menciptakan kondisi yang disebut kerentanan sosial. Kerentanan sosial dapat dimaknai sebagai keadaan di mana individu atau kelompok berada dalam posisi lemah untuk melindungi diri dari risiko sosial, ekonomi, maupun kekerasan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Bagi transpuan, kerentanan sosial tercermin dalam keterbatasan mereka dalam mengakses pendidikan formal, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam sistem hukum dan administrasi di Indonesia, transpuan juga sering mengalami kesulitan ketika harus berurusan dengan dokumen resmi yang tidak sesuai dengan identitas

gender mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat menikmati hak-hak sipil secara penuh sebagaimana warga negara lainnya.

Kerentanan sosial yang dialami transpuan juga terlihat dalam aspek kehidupan sehari-hari. Banyak transpuan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap karena penolakan dari keluarga atau masyarakat. Di sisi lain, ketika mereka mengalami kekerasan atau pelecehan, akses terhadap keadilan sering kali terhambat karena aparat penegak hukum tidak memahami atau tidak sensitif terhadap isu gender non-biner. Situasi ini memperkuat posisi transpuan sebagai kelompok yang termarginalkan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks ini, stigma dan kerentanan sosial bukanlah dua hal yang berdiri terpisah, tetapi saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Stigma menghasilkan kerentanan, dan kerentanan memperdalam stigma yang melekat pada kelompok tersebut.

Transpuan yang ada di Yayasan Srikandi Pasundan dipilih sebagai subjek penelitian karena secara objektif, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Yayasan Srikandi Pasundan menghadapi tantangan ganda, yang semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Pertama, meskipun berada di bawah naungan sebuah yayasan, sebagian besar anggotanya masih mengalami diskriminasi struktural yang akut dalam mengakses lapangan pekerjaan formal, pendidikan, dan layanan kesehatan publik, yang mana hal ini secara langsung memicu kerentanan ekonomi dan sosial. Kedua, lingkungan eksternal sering kali menampilkan resistensi sosial yang tinggi, ditandai dengan kasus-kasus bullying, penolakan dari keluarga, serta liputan media yang cenderung menghakimi, yang pada akhirnya memperkuat stigma internal di kalangan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan di mana transpuan di yayasan secara kolektif menjadi penyintas, sehingga menjadikan Yayasan Srikandi Pasundan sebagai situs krusial untuk mengidentifikasi akar masalah stigmatisasi dan mengukur tingkat kerentanan sosial yang mereka alami sehari-hari.

Di tengah situasi yang kompleks ini, kehadiran lembaga sosial seperti Yayasan Srikandi Pasundan hadir. Yayasan ini merupakan salah satu organisasi yang fokus pada isu-isu penanggulangan HIV di Kota Bandung dan inklusifitas

bagi para transpuan. Yayasan Srikandi Pasundan berperan sebagai wadah pemberdayaan, advokasi, dan pendampingan bagi transpuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan hukum, dan penyuluhan kesehatan, yayasan ini berupaya menciptakan ruang aman bagi transpuan untuk mengembangkan diri dan memperoleh akses terhadap kehidupan yang lebih layak. Selain itu, yayasan ini juga aktif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih memahami isu keberagaman gender dan mengurangi prasangka negatif terhadap komunitas transpuan.

Melihat latar belakang permasalahan tersebut, Peneliti merasa penting karena berupaya untuk mengungkap kondisi objektif di lapangan tentang bagaimana proses stigmatisasi dialami oleh transpuan yang berada di bawah naungan Yayasan Srikandi Pasundan yang berada di wilayah Kota Bandung, serta bagaimana stigma tersebut berdampak pada kerentanan sosial yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya faktor internal dan eksternal dalam kesejahteraan transpuan, seperti studi oleh (Shaqinna et al., 2021) di Kota Surabaya yang menemukan bahwa meskipun menghadapi penolakan sosial dan diskriminasi, partisipan transpuan dapat mempertahankan kepuasan hidup melalui penerimaan diri, dukungan komunitas yang kuat, dan ketahanan sosial yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Penelitian kualitatif tersebut menunjukkan bahwa meskipun menghadapi diskriminasi dan stigma, transpuan mampu mempertahankan kepuasan hidup melalui penerimaan diri, dukungan komunitas yang kuat, dan ketahanan sosial yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Namun, penelitian tersebut berfokus utama pada dimensi psikologis (kepuasan hidup) dan ketahanan individual mereka dalam konteks organisasi di Surabaya.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut. Meskipun penelitian Shaqinna, dkk. (2021) memberikan wawasan berharga mengenai ketahanan dan kepuasan hidup transpuan di Surabaya, kajian tersebut masih memiliki fokus utama pada dimensi psikologis seperti penerimaan diri dan life satisfaction

individu. Kesenjangan ini membuka peluang penting bagi penelitian ini untuk melangkah lebih jauh, yakni dengan menggunakan pendekatan sosiologis guna menganalisis proses stigmatisasi yang bersifat struktural dan bagaimana hal tersebut secara langsung berujung pada kerentanan sosial yang dialami transpuan dalam keseharian. Selain perbedaan fokus kajian, lokus penelitian ini juga berbeda, yaitu di Yayasan Srikandi Pasundan, Kota Bandung. Perbedaan konteks ini penting karena memungkinkan Peneliti untuk menggali dinamika sosial, budaya, dan peran spesifik yayasan tersebut dalam mengelola kerentanan, yang mungkin berbeda dengan temuan pada komunitas di wilayah Surabaya. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosiologi gender, khususnya terkait dinamika stigma dan kerentanan sosial pada kelompok minoritas gender di Indonesia. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Stigmatisasi dan Kerentanan Sosial pada Identitas Transpuan (Penelitian di Yayasan Srikandi Pasundan).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus kajian terhadap fenomena yang dialami oleh transpuan di Yayasan Srikandi Pasundan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk bentuk stigma yang dialami oleh Transpuan dalam kehidupan sosial mereka?
2. Bagaimana stigmatisasi tersebut memengaruhi kondisi kerentanan sosial mereka?
3. Bagaimana manajemen ketahanan identitas dari Yayasan Srikandi Pasundan dalam mengatasi kerentanan sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk stigma yang dialami oleh transpuan di lingkungan kehidupan sosial.

2. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses stigmatisasi berpengaruh terhadap munculnya kerentanan sosial pada transpuan.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan manajemen ketahanan identitas yang diterapkan oleh Yayasan Srikandi Pasundan dalam mengatasi kerentanan sosial.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, Peneliti mengharapkan temuan pada penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa depan, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosiologi, khususnya pada bidang sosiologi gender dan studi tentang stigma sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses stigmatisasi terbentuk dan bekerja dalam kehidupan sosial kelompok minoritas gender, terutama transpuan. Kajian ini juga dapat memperkaya pemikiran sosiologis mengenai hubungan antara identitas gender, penerimaan sosial, dan kerentanan dalam struktur masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan heteronormatif.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Peneliti lain yang tertarik meneliti isu-isu serupa, baik dalam konteks gender maupun marginalisasi sosial. Dengan menyoroti pengalaman transpuan di Yayasan Srikandi Pasundan, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana akademik mengenai identitas gender dan membuka ruang dialog yang lebih inklusif dalam dunia akademis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan literatur bagi mahasiswa dan akademisi yang mempelajari teori-teori sosiologi seperti teori stigma Erving Goffman, teori interaksionisme simbolik, serta konsep kerentanan sosial dalam masyarakat modern.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Beberapa manfaat yang diharapkan meliputi:

a. Kegunaan untuk peneliti

Kegunaan praktis penelitian ini bagi Peneliti adalah untuk mengembangkan sensitivitas dan kompetensi profesional yang esensial dalam isu gender dan kelompok termarginalisasi. Secara sosial, keterlibatan langsung Peneliti di Yayasan Srikandi Pasundan memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara nyata dengan mengidentifikasi akar masalah stigmatisasi dan kerentanan, yang mana hasil temuan tersebut akan diartikulasikan menjadi rekomendasi kebijakan dan intervensi yang dapat digunakan oleh Yayasan, pemerintah daerah, atau lembaga advokasi lainnya.

b. Kegunaan untuk pihak sosial terkait

Kegunaan praktis bagi masyarakat, lembaga sosial, dan pihak-pihak yang bergerak dalam bidang advokasi hak-hak kelompok rentan, khususnya komunitas transpuan. Bagi Yayasan Srikandi Pasundan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merancang program pemberdayaan, pendampingan, dan advokasi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial yang dihadapi oleh para transpuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai sosial dalam upaya membangun masyarakat yang lebih manusiawi, setara, dan menghargai keberagaman.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa identitas gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Identitas transpuan sebagai bagian dari keragaman gender sering kali diposisikan secara marginal akibat cara pandang masyarakat yang masih berorientasi pada sistem biner, laki-laki dan perempuan serta nilai-nilai patriarkal dan heteronormatif yang kuat. Dalam konteks tersebut,

muncul proses sosial berupa pelabelan dan penilaian negatif terhadap individu transpuan yang berujung pada tindakan diskriminatif dan pengucilan.

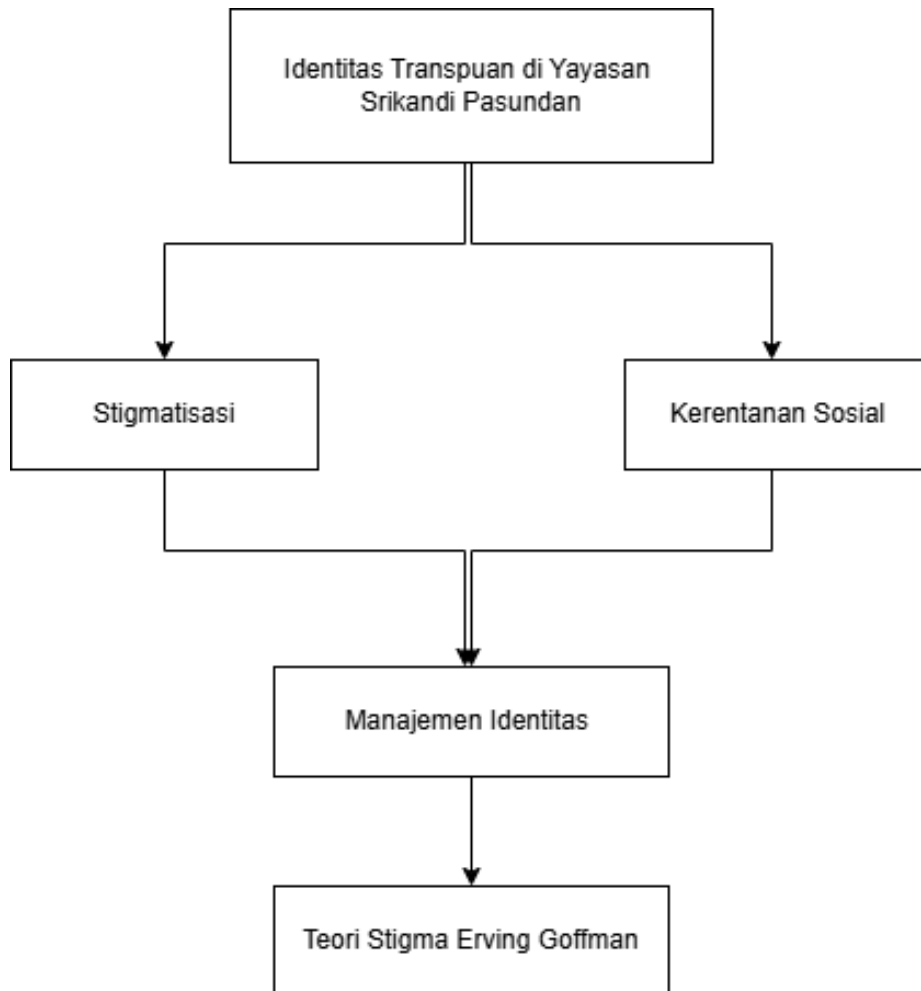
Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pijakan dari teori stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Goffman menjelaskan bahwa stigma muncul ketika seseorang memiliki atribut yang dianggap menyimpang dari norma sosial yang berlaku, sehingga keberadaannya dinilai “tidak normal” atau “tidak pantas” oleh masyarakat. Dalam kasus transpuan, stigma sering kali muncul karena identitas gender mereka dianggap tidak sesuai dengan kategori gender yang diterima secara sosial dan kultural. Stigma ini tidak hanya berbentuk penilaian sosial, tetapi juga berdampak pada perilaku diskriminatif yang diterima dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan relasi sosial.

Proses stigmatisasi yang terus berlangsung menimbulkan berbagai bentuk kerentanan sosial, karena transpuan harus menghadapi hambatan struktural dan sosial yang membatasi kesempatan mereka untuk hidup layak. Kerentanan tersebut dapat muncul dalam bentuk keterbatasan akses ekonomi, tekanan psikologis akibat penolakan sosial, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum atau layanan publik yang setara. Dalam konteks inilah, Yayasan Srikandi Pasundan hadir sebagai ruang aman dan lembaga pendampingan yang berperan penting dalam membantu transpuan menghadapi stigma. Yayasan ini berupaya memberikan dukungan sosial, advokasi, serta kegiatan pemberdayaan untuk memperkuat posisi sosial dan psikologis komunitas transpuan.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara stigmatisasi sosial dan kerentanan sosial yang dialami oleh transpuan, serta memposisikan Yayasan Srikandi Pasundan sebagai aktor sosial yang berperan dalam meminimalisir dampak negatif dari stigma tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami pengalaman hidup transpuan secara mendalam bagaimana mereka memaknai stigma, cara mereka bertahan, dan sejauh mana dukungan sosial membantu membentuk ketahanan diri di tengah tekanan sosial yang mereka hadapi.

**Gambar 1.1**

Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti (2025)